KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
B. Maksud dan Tujuan 2
BAB II PENETAPAN RENCANA KINERJA 4
A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4
B. Penetapan Kinerja Tahun 2018 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PUSDATIN TAHUN 2018 10
A. Pengukuran Kinerja 10
B. Analisa Capaian Kinerja Utama 11
BAB IV PENUTUP 14
A. Kesimpulan 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kerja PUSDATIN 2018 4
Tabel 2. Perincian Perencanaan Pusdatin Tahun 2018 4
Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusdatin Tahun 2018 7
Tabel 4. Indikator Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum 8
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi 8
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Bidang Data dan Pengamanan Jaringan 9
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kinerja Pusdatin Pada Tahun 2018 10
Tabel 8. Capaian Kinerja Utama Pusdatin tahun 2018 11
Tabel 9. Capaian Layanan internal 11
Tabel 10. Layanan Data dan Informasi 12
Tabel 11. Layanan Perkantoran 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pusdatin sebagai salah satu Unit Esselon II Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengembangan teknologi informasi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta Pusdatin untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Pusdatin yang akan datang dan berperan dalam pengembangan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin mengacu kepada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM, tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruh layanan teknologi informasi memiliki data yang akurat dan akuntabel dibidangnya dan meningkatkan pengembangan teknologi informasi melalui sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi, Manajemen Sistem Informasi dan Layanan Perkantoran. Pusdatin juga melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program ini adalah Pembenahan fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi melalui sub kegiatan Pengembangan Data dan Jaringan Sistem Teknologi Informasi.

Dalam menjalankan tugasnya Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Tata Nilai yang berlaku adalah :

1. Kepentingan Masyarakat
2. Integritas
3. Responsif
4. Akuntabel
5. Profesional

Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta pengamanan dan pemeliharaan teknologi

informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) adalah :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran PUSDATIN;
b. Penyusunan rencana, standarisasi dan fasilitasi teknologi informasi;
c. Koordinasi dan kerja sama pengelolaan data,penyajian informasi;
d. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal infrastruktur teknologi informasi dengan unit terkait;
e. Pengelolaan sistem pengadaan dan informasidata manajemen pengadaan Kementerian secara elektronik;
f. Pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
g. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan PUSDATIN;
h. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Berdasarkan Pasal 1264 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 29 Tahun 015 tanggal 29 September 2015 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, susunan organisasi PUSDATIN terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha dan Umum
   a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Bidang Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi
   a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
   b. Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi;
   c. Subbidang Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi.
3. Bidang Data dan Pengamanan Jaringan
   a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi
   b. Subbidang Pengamanan Data dan Jaringan
   c. Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan teknologi informasi Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2018.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk memberikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN). Hal ini sebagai bentuk peran serta Pusdatin untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Pusdatin yang akan datang dan berperan dalam pengembangan teknologi informasi.

BAB II
PENETAPAN RENCANA KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja Pusdatin disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing bagian/bidang di Pusdatin dengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya. Perencanaan Kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pusdatin. Berikut adalah rencana kerja dan anggaran Pusdatin Tahun 2018.

Tabel 1. Rencana Kerja PUSDATIN 2018

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Layanan Data dan Informasi	18.980.629.000,-
			Layanan Perkantoran	5.232.031.000,-
			Layanan Internal	59.240.000,-

Adapun Perincian Perencanaan Pusdatin Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perincian Perencanaan Pusdatin Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT		ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	Layanan Data dan Informasi	**5849.963**	Manajemen Sistem Informasi	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	18.980.629.000
				Tersedianya Komite Pengarah TIK Kementerian Hukum dan HAM RI (IT Steering Committee)	

				Terlaksananya Penyusunan Standardisasi Teknologi Informasi	
				Terlaksananya Pelatihan Data	
			Pengelolaan Data dan Informasi	Sewa *Bandwith*	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Sisumaker	
				Tersedianya Supporting Video Conference	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mail Zimbra	
				Tersedianya SMS Blast Sisumaker	
				Terlaksananya rapat pengelolaan TI	
	Tersedianya Layanan Perkantoran	**5849.994**	Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	5.232.031.000
				Terlaksananya Pembayaran uang lembur	
			Operasional Pemeliharan Kantor	Terlaksananya perawatan dan perbaikan inventaris kantor	
				Perawatan kendaraan	

				bermotor roda 4 dan roda 2	
				Terpenuhinya operasional perkantoran dan pimpinan	
				Terlaksannya koordinasi dan konsultasi	
				Terlaksannya sewa jaringan VPN *Presidential Lecture*	
	Layanan Internal (*Overhead*)	**1561.951**	Layanan Internal	Tersusunnya rencana anggaran	59.240.000
				Tersusunnya Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	
				Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	
				Tersedianya pelayanan umum dan perlengkapan	
		JUMLAH			24.271.900.000

B. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

1. untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmenantara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pusdatin telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Berikut Penetapan Kinerja Pusdatin Tahun 2018:

Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusdatin Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	1	Terlaksananya penyusunan rencana, anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan perlengkapan yang akurat dan akuntabel	**1 Layanan**
	2	Tersusunnya manajemen sistem informasi, pengelolaan Data serta Pengamanan dan pemeliharaan Jaringan	**1 layanan**
	3	Terlaksananya Layanan perkantoran yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran	**12 Bulan Layanan**

Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM pada awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp.23.638.473.000,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Pada bulan September 2018 terdapat penambahan pada pagu belanja pegawai sebesar Rp. 433.427.000 sehingga menjadi Rp 24.071.900.000 dan pada bulan Nopember 2018 terdapat penambahan pada pagu layanan data dan informasi sebesar Rp. 200.000.000 sehingga total pagu anggaran sebesar 24.271.900.000

Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha dan Umum

   Tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum adalah Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Melaksanakan evaluasi

dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bagian Tata Usaha dan Umum dibantu oleh 3 (tiga) subbagian yaitu :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Indikator keberhasilan kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum adalah Jumlah layanan perkantoran yang meningkat kualitas dan profesionalitasnya, dimana dijabarkan dalam Indikator Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum.

Tabel 4. Indikator Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum

Sasaran Program	Indikator Konerja	Target	Anggaran
Layanan Internal (*overhead*)	Terlaksananya penyusunan rencana, anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan perlengkapan yang akurat dan akuntabel	1 layanan	Rp. 59.240.000
Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan perkantoran yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran	12 Bulan Layanan	Rp.5.232.629.000

2. Bidang Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi

Tugas dan fungsi Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi adalah Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dalam pengembangan sistem standarisasi,kerjasama dan evaluasi terhadap teknolog informasi, pemutakhiran teknologi informasi di lingkungan kementerian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi dibantu oleh 3 (tiga) subbidang yaitu :

1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
2) Subbidang Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi;
3) Subbidang Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi.

Indikator keberhasilan kinerja Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi adalah Jumlah Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi

Sasaran Program	Indikator Konerja	Target	Anggaran
Manajemen Sistem Informasi	TerlaksananyaPengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 layanan	Rp. 604.460.000,-
	Tersedianya Komite Pengarah TIK Kementerian Hukum dan HAM RI (IT		

	Steering Committee)		
	TerlaksananyaPenyusunan Standardisasi Teknologi Informasi		
	Terlaksananya Pelatihan Data		

3. Bidang Data dan Pengamanan Jaringan

Tugas dan fungsi Bidang Data dan Pengamanan Jaringan adalah Melaksanakan penyiapan koordinasi,pengelolaan data , penyajian informasi, pengamanan data dan jaringan serta pemeliharaan sistem perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Data dan Pengamanan Jaringan dibantu oleh 3 (tiga) subbidang yaitu :

1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi;
2) Subbidang Pengamanan Data dan Jaringan;
3) Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi

Indikator keberhasilan kinerja Bidang Data dan Pengamanan Jaringan adalah Jumlah Pengelolaan Data dan Pengamanan Jaringan yang terintegrasi dalam portal Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Bidang Data dan Pengamanan Jaringan.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Bidang Data dan Pengamanan Jaringan

Sasaran Program	Indikator Konerja	Target	Anggaran
Pengelolaan Data dan Informasi	Sewa *Bandwith*	1 layanan	Rp. 18.376.169.000,-
	TerlaksananyaBimbingan Teknis Operator Aplikasi Sisumaker		
	Tersedianya Supporting Video Conference		
	Terlaksananya Pemeliharaan Mail Zimbra		
	Tersedianya SMS Blast Sisumaker		
	Terlaksananya rapat pengelolaan TI		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PUSDATIN TAHUN 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdatin merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2018. Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Pusdatin, aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdatin tahun 2018 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing bagian/bidang Eselon III yang secara konsisten dapat melaksanakannya, baik dengan atau tanpa dukungan anggaran, dan hingga berakhirnya tahun anggaran 2018 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran Pusdatin atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana di lapangan. Namun demikan bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas. akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, Pusdatin terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan tugas Pusdatin di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja Pusdatin pada tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kinerja Pusdatin Pada Tahun 2018

No	Kode dan Nama Output	Kategori Output	Keuangan			Fisik	
			Pagu	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	5849.963 Layanan Internal (over head)	Bel. Barang RM	Rp. 59.240.000	Rp. 59.240.000	Rp. 59.102.700	100,00	100,00
2	5849.963 Layanan Data dan Informasi	Bel. Barang RM	Rp. 18.980.629.000	Rp. 18.980.629.000	Rp. 18.925.481.567	100,00	100,00
3	5849.963 Layanan Perkantoran	Bel. Barang RM	Rp. 5.232.031.000	Rp. 5.232.031.000	Rp. 5.087.809.324	100,00	100,00

B. Analisa Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja utama Pusdatin Tahun 2018 diketahui bahwa capaian kinerja utama Pusdatin pada Tahun 2018 sebesar 296,72%, jika dirata-rata capaiannya sebesar 98,18%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase (%) Layanan Data dan Informasi sebesar 100% . Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.18.925.481.567,- (99,71%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.18.980.629.000,-;
2. Persentase (%) Layanan Perkantoran sebesar 100% .Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.5.087.809.324,- (97,24%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.5.232.031.000,-;
3. Persentase (%) Layanan Internal sebesar 100,00%. Sedangkan realisai anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.59.102.700,- (99,77%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.59.240.000,-.

Tabel 8. Capaian Kinerja Utama Pusdatin tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Hasil Capaian	
			Berhasil	Tidak Berhasil
Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	1	Layanan Internal	**99,77%**	**0**
	2	Layanan Data dan Informasi	**97,71%**	**0**
	3	Layanan Perkantoran	**99,24%**	**0**

Berikut penjelasan masing-masing layanan:

1. Layanan Internal

Layanan internal terdiri dari lima komponen utama yaitu penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pelayanan umum dan perlengkapan. Rincian kinerjanya dapat dillihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Layanan internal

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
5849.951	Layanan Internal (over head)	59.240.000	59.102.700	137.300	99,77%
051	Penyusunan Rencana Anggaran	4.720.000	4.675.500	44.500	99,06%
054	Pengelolaan Keuangan	29.120.000	29.042.500	77.500	99,73%
056	Pengelolaan Kepegawaian	5.720.000	5.710.700	9.300	99,84%
057	Pelayanan Umum dan perlengkapan	19.680.000	19.674.000	6.000	99,97%

2. Layanan Data dan Informasi

Layanan data dan informasi terdiri dari dua komponen utama yaitu manajemen sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 10. Layanan Data dan Informasi

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
5849.963	Layanan Data dan Informasi	18.980.629.000	18.925.481.567	55.147.433	99,71%
051	**Manajemen Sistem Informasi**	**604.460.000**	**590.721.634**	**13.738.366**	**97,73%**
A	Pengelolaan sistem Pengadaan secara elektronik	226.276.000	223.250.330	3.025.670	98,66%
B	Komite pengarah TIK Kemenkumham	107.824.000	107.188.354	635.646	99,41%
C	Penyusunan Standarisasi TI	182.360.000	172.284.950	10.075.050	94,48%
D	Pelatihan Data	88.000.000	87.998.000	2.000	100,00%
052	**Pengelolaan Data Dan Informasi**	**18.376.169.000**	**18.334.759.933**	**41.409.067**	**99,77%**
A	Sewa Bandwith	18.063.120.000	18.041.671.920	21.448.080	99,88%
B	Bimbingan Teknis Operator Aps. SISUMAKER	27.809.000	27.746.900	62.100	99,78%
C	Pengadaan Supporting video Conference	125.000.000	123.090.000	1.910.000	98,47%
D	Pemeliharaan Mail Zimbra	2.200.000	0	2.200.000	0,00%
E	pengadaan SMS Blast SISUMAKER	113.000.000	105.651.074	7.348.926	93,50%
F	Rapat pengelolaan TI	45.040.000	36.600.039	8.439.961	81,26%

3. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran ini terdiri dari dua output yaitu gaji dan tunjangan dan operasional dan pemeliharaan kantor.

Tabel 11. Layanan Perkantoran

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
5849.994	Layanan Perkantoran	5.232.031.000	5.087.809.324	144.221.676	97,24%
001	**Gaji Dan Tunjangan**	**3.201.859.000**	**3.170.321.346**	**31.537.654**	**99,02%**
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	2.869.807.000	2.838.297.346	31.509.654	98,90%
B	Belanja Uang Lembur	332.052.000	332.024.000	28.000	99,99%
002	**operasional dan pemeliharaan kantor**	**2.030.172.000**	**1.917.487.978**	**112.684.022**	**94,45%**
A	Perawatan dan Perbaikan Inventaris Kantor	551.955.000	478.809.685	73.145.315	86,75%
B	Perawatan Kendaraan	101.834.000	101.489.064	344.936	99,66%

	Bermotor Roda 4 dan Roda 2				
C	Operasioanal Perkantoran dan Pimpinan	1.033.773.000	1.013.526.380	20.246.620	98,04%
D	Koordinasi dan Konsultasi	242.610.000	223.731.479	18.878.521	92,22%
E	Belanja sewa (jaringan VPN Presidential Lecture)	100.000.000	99.931.370	68.630	99,93%

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ada 3 (tiga) program yaitu: Layanan Internal (*overhead*), Layanan Data dan Informasi, dan Layanan Perkantoran;
2. Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja utama Pusdatin Tahun 2018 diketahui bahwa capaian kinerja utama Pusdatin pada Tahun 2018 sebesar 100% dengan nilai serapan 98,18% dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp. 24.271.900.000,- ;
3. Persentase (%) Layanan Data dan Informasi sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.18.925.481.567,- (99,71%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.18.980.629.000,-;
4. Persentase (%) Layanan Perkantoran sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.5.087.809.324,- (97,24%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.5.232.031.000,-;
5. Persentase (%) Layanan Internal sebesar 100,00%, sedangkan realisai anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.59.102.700,- (99,77%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.59.240.000,-.

21 Januari 2019
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

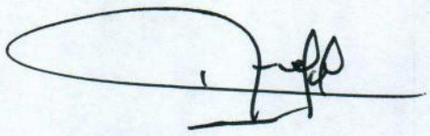

Mohamad Aliamsyah
NIP. 196805121991031002